

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abbas, D.S. (2017). *“Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional”*. Prenda Media.
- Adolf, H. 2020 . *“Hukum penyelesaian sengketa internasional”*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. 2021. *“Metode Penelitian Hukum”*. Sinar Grafika
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*. Jakarta: PT. Rineka cipta.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum”*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Duli, N. 2019. *“Metodologi Penelitian Kuantitatif, Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi dan Analisis Data Dengan SPSS”*. Deepublish.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *“Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*. Depok: Prenadamedia Grup.
- El-Muhtaj, M. 2017. *“Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia”*. Prenada Media.
- Fajar, Mukti. Yulianto Achmad. 2010. *“Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif”*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- H.S., Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. 2017. *“Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”*. Bandung: Alfabeta
- Jogiyanto Hartono, M. 2018. *“Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data”*. Penerbit Andi.
- Mariza, Prima Idwan, et al. 2022. *“Peranan Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Aset Perkebunan Negara di Sumatra Utara”*. Bhuana Ilmu Populer.
- Maringka, J. S. 2022. *“Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional”*. Sinar Grafika.
- Nazir, Moh. 2014. *“Metode Penelitian”*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Nugroho, S. A., & SH, M. 2017. “*Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*”. Kencana. Paramita.
- Nugroho, S.A., & SH, M. 2019. “*Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*”. Prenada Media.
- Raharjo, Satjipto. 2014. “*Ilmu Hukum*”. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sarosa,S. 2021. “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*”. PT Kanisius.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. 2015. ‘*Kamus Hukum*’. Jakarta: Pradnya.
- Sugiyono. 2015. “*Metode Penelitian Kombinasi (MixMethods)*”. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”. Bandung: CV Alfabet.
- Surachman, E.R. 2022. “*Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*”. Jakarta: Sinar Grafika.
- Swarjana, I.K., & SKM, M. 2022. “*Populasi Sampel, Teknik Sampling dan Bias Dalam Penelitian*”. Penerbit Andi.
- Yustisia, Tim Pustaka. 2014. “*Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS*”. Visi Media.

ARTIKEL DALAM JURNAL ILMIAH

- Afzulkifli, M. “Penyelesaian Tunggakan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja”. *Lex Lata*, Volume 2, No. 2 tahun 2022.
- Anggriani, Sopia Weni. “Kualitas pelayanan bagi peserta BPJS kesehatan dan non BPJS kesehatan”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, Volume 5, No.2 tahun 2016.
- Ansari, M. I., & Hadi, I. K. “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Jaksa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, No. 2 tahun 2013.
- Amaliyah, A., & Istiqamah, I. “Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”. *Alauddin Law Development Journal*, Volume 3, No.2 tahun 2021.
- Arifin, Z. 2020. “Metodologi Penelitian Pendidikan”. *Jurnal Al-Hikmah*, Volume 1, No.1 tahun 2020.

- Astuti, Endang Kusuma. "Peran BPJS Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Volume 1, No.1 tahun 2020.
- Elvarisha, E., Ridwan, R., & Ibrahim, Z. "Penerapan Sanksi Administratif bagi Pemberi Kerja yang Belum Mendaftarkan Pkerjanya Menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS)". *Lex LATA*, Volume 2, No.2 tahun 2022.
- Fitriani, R. "Aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, No. 1 tahun 2017.
- Hapsari, D., Erna, N. K., & Sugama, I. "Upaya Mediasi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggalan Pembayaran Listrik Negara". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 11 tahun 2019.
- Ilmi, M., & Suhaimi, E. "Penyelesaian Tunggalan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Studi Kasus pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger". *Law Dewantara*, Volume 2, No.1 tahun 2022.
- Prabaningtyas, G. A. A., Budiarta, N. P., & Widyantara, I. M. M. "Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Menyelesaikan Kasus Mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Denpasar". *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 2, No. 3 tahun 2021.
- Prayitno, D. "Pelayanan Penanganan Penunggalan Iuran BPJS Bagi Peserta JKN-KIS Kesehatan di Kantor Cabang Kota X". *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, Volume 10, No.1 tahun 2023.
- Puryanto, P. "Implementasi Kebijakan Tunggalan Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Di Kota Padang". *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, Volume 2, No. 1 tahun 2022.
- Putra, A. K., Rani, F. A., & Syahbandir, M. "Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh)". *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 1, No. 2 tahun 2017.
- Rosita, D. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 3, No. 1 tahun 2018.
- Ruchimat, T. (2021). "Analisis Tentang Keabsahan Kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Dalam Penyelesaian Tunggalan Iuran Jaminan BPJS Kesehatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan". *Jurnal Hukum Adigama*,

Volume 4, No.1 tahun 2021.

Sentani, L. P., & Syakurah, R. A. “Gambaran Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Peserta BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) Swasta Di Wilayah Depok Periode Juni-Juli 2021”. *JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama*, Volume 10, No. 2 tahun 2022.

Simanjuntak, J. (2018). “Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara(TUN)”. *Lex Administratum*, Volume 6, No.1 tahun 2018.

Solechan, Solechan. “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik”. *AdministrativeLaw and Governance Journal*, Volume 2, No.4 tahun 2019.

Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. “Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 8, No. 2 tahun 2020.

Yusuf, M., Sampurno, S., Hasrul, M., & Arisaputra, M. I. “Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara”. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, Volume 21, No. 2 tahun 2018.

ARTIKEL DALAM INTERNET

Detik Bali. 2023. *Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Jembrana Tembus 10 Miliar*, diakses melalui <https://www.detik.com> pada 9 September 2023

RRI. 2023. *BPJS Semarang Dukung CSR Perusahaan* diakses melalui <https://www.rri.co.id> pada 9 September 2023

Pemkab Buleleng. 2021. *Kabupaten Buleleng* diakses melalui <https://www.bulelengkab.go.id> pada 10 November 2023

Kejaksaan Negeri Buleleng. 2023. *Info Kejaksaan Negeri Buleleng* diakses melalui <http://kejari-buleleng.kejaksaan.go.id> pada 10 November 2023

Wikipedia. 2023. *Kabupaten Buleleng* diakses pada melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Buleleng pada 5 Desember 2023

SKRIPSI/TESIS

Adiyaksa, I. T. 2022. *“Peran Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Studi Pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo”* (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya.

Aldi Ayyubie, Y. (2018). *“Kedudukan Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Sebagai Jaksa Pengacara Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Penelitian Pada Kejaksaan Negeri Serang)”* (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Mukhtar, S. (2022). *“Peranan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”* (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Rahman, R. A. N. (2017). *“Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945”* (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Sitio, E. E. (2022). *“Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Upaya Mediasi Penyelesaian Piutang Share Handling Antara Perusahaan Bongkar Muat Dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang”* (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi

Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210.

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

